Harian Jogja

Selasa Legi
22 Juni 2010

Keraton-Jerman kerja sama digitalisasi manuskrip

Menjaga sejarah dari kepunahan

Oleh Andreas Tri Pamungkas
WARTAWAN HARIAN JOGJA

"Manuskrip merupakan salah satu isi Keraton, sehingga memerlukan aspek keamanan. Pengalaman yang terjadi semasa Sri Sultan HB II ditangkap Inggris tidak terjadi lagi."

Begitulah sedikit cerita Raja Keraton Jogja, Sri Sultan Hamengku Buwono X saat penandatanganan nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*/MoU) proyek pelestarian naskah atau digitalisasi manuskrip naskah Jawa yang dimiliki Keraton Jogja dengan Direktur Institute Studi Oriental Universitas Leipzig Eckehard Schulz di Gedhong Jene, Keraton Jogja, Senin (21/6).

Sultan secara gamblang ingin memberikan tekanan tentang perjalanan manuskrip Jawa. Sebuah catatan penting tentang sejarah. Kalau kemudian catatan itu hilang, berarti banyak hal yang hilang dari sebuah sejarah.

Lebih lengkap halaman 2

Menjaga sejarah...

Manuskrip keraton, lanjut Sultan, telah banyak yang berada di luar negeri. Sebagian disimpan di British University. "Waktu itu [saat kedatangan pasukan Kerajaan Inggris] selama lima hari buku-buku Keraton diangkut dengan gerobak untuk dibawa ke Inggris,"

Karena itu, dia menginginkan agar ada keamanan khusus terhadap manuskrip itu. Dan kerja sama dengan Universitas Leipzig ini diharapkan mampu menyelematkan manuskrip yang tersisa.

Hadir dalam acara kemarin Duta Besar Heidrun Tempel, Duta Besar Khusus untuk Dialog Antarbudaya, Duta Besar Indonesia untuk Jerman Eddy Pratomo, GBPH Joyokusumo dan Rektor UIN Amin Abdullah serta sejumlah staf Kementerian Luar Negeri. Serta beberapa pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY.

Untuk menjaga keamanan manuskrip itu, Sultan meminta agar Universitas Leipzig dapat menerapkan *management security* terhadap naskah-naskah yang sudah disimpan secara digital itu. Jika tidak dilakukan, kata dia, Keraton akan menjalin kerja sama dengan Lembaga Sandi Negara Republik Indonesia (RI) untuk menjamin kepastian keamanan naskah-naskah yang didigitalisasi.

Gubernur DIY itu mengatakan ke depan masyarakat yang ingin mengakses naskah milik Keraton tidak perlu membuka naskah aslinya karena berisiko menimbulkan kerusakan pada buku-buku yang dilihat. "Masyarakat cukup mengakes naksah yang sudah disimpan dalam bentuk digital. Digitalisasi sangat penting untuk naskah-naskah yang ada," ujar dia.

Beberapa tahun ini Keraton Jogja juga sudah menjalin kerjasama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Jogja untuk mengalihbahasakan naskah yang ada ke dalam Bahasa Indonesia. "Harapannya agar masyarakat bisa juga menikmati naskah-naskah tersebut", ungkap Sultan.

Duta Besar RI untuk Jerman, Eddy Pratomo mengatakan, dalam kerja sama ini ahli-ahli dari Jerman akan mendigitalisasi naskah-naskah yang ada di Keraton, sehingga bisa lebih baik dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkannya. Namun, kata dia, pemanfaatan manuskrip yang telah digitalisasi ini tetap harus seizin Keraton. "Sekurangnya Jerman akan membantu mendigitalisai sekitar 300 manuskrip yang selama ini tersimpan di perpustakaan Keraton," katanya.

Dia menambahkan, penandatanganan MoU itu juga merupakan bagian dari Kunjungan Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmeier ke beberapa negara, termasuk Indonesia untuk membahas penyelenggaraan kerja sama dan dialog antarmasyarakat yang beraneka ragam di berbagai negara.

"Masyarakat Jerman bersifat multikultur. Mereka ingin belajar membangun dialog dengan berbagai negara, termasuk dengan Keraton Jogja yang sangat bisa menjaga pluralisme. Di Jerman ada sekitar 5 juta umat Islam yang sebagian besar merupakan imigram dari Turki," jelasnya.

Eckehard Schulz mengatakan, MoU ini sangat berarti bagi Universitas Leipzig dalam rangka melanjutkan tugas mengerjakan digitalisasi manuskrip Jawa. Dia berharap, Jerman juga bisa mempelajari sejarah dan peran Keraton dalam perkembangan Islam di Indonesia.

"Ini bagian kami dalam membangun dialog dengan umat-umat beragama di berbagai negara, serta lebih memahami pluralisme umat beragama," katanya.

Sementara menurut Kepala Humas dan Protokoler Pemprov DIY, Biwara Yuswantara, dari sekitar 300 manuskrip sudah sekitar 130 yang telah didigitalisasi sehingga masih ada sekitar 170 yang belum.